

Kinerja Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam Penanganan Fakir Miskin di Wilayah Perkotaan

The Performance of Collective Business Group in Handling the Poor in Urban Areas

Anwar Sitepu

Puslitbang Kesos, Kementerian Sosial, Jl. Dewi Sartika 220, Cawang III, Jakarta Timur
Telpon (021) 8017146. Fax: (021) 8017126. HP. +6281316017972. E-mail: sitepu.anwar@yahoo.co.id.
Diterima 05 Mei 2017, diperbaiki 27 Juni 2017, disetujui 25 Oktober 2017

Abstract

The number of poor people in Indonesia is still quite high, spreading in rural areas, urban areas, coastal areas, small islands and countries' border. Government and community are keep trying to resolve this issue, however declining rate of the number of poor people tends to slow down, including in urban areas. This research aimed to know the performance of the collective business group (CBG) in handling the problems of the poor in urban areas. The research was conducted in two cities, namely Tomohon and Manado in North Sulawesi Province. The subject are the entire CBG that was formed in the fiscal year of 2013 in two cities, which were 10 CBG in Tomohon and 60 CBG in Manado. Data were collected by interview, observation and focus group discussion, in May and July 2016. In practice only as many as 9 in the city of Tomohon and 52 Kube in Manado found. The research results show that the performance of the Kube relatively less well. The largest portion of the CBG have been disbanded 77.8 percent in Tomohon and 90.4 percent in Manado. CBG which are still active as much as two units in Tomohon and five units in Manado. More than half had already disbanded prior to the first anniversary. There are five main reasons that make CBG disbanded, namely business losses, members reluctant to continue their joint effort, natural disasters, and dissent. UEP suffered losses due to three factors, namely the high cost of production, it is not economical, influenced by the weather. Meanwhile, CBGs that survive also less able to give significant additional income for its members. The overall performance of the CBG in two cities has not been sufficient to eradicate poverty. The low performance of the CBGs occur due to a series of program implementation process done professionally, tend to be oriented solely to administrative settlement. Project management has not taken control of technical activities with good substance, at all stages.

Keyword: performance; collective business group (CBG); handling the poor.

Abstrak

Jumlah penduduk miskin Indonesia masih cukup tinggi, tersebar baik di wilayah perdesaan, perkotaan, maupun di wilayah pesisir, pulau kecil dan perbatasan antarnegara. Pemerintah dan masyarakat terus berupaya melakukan penanganan, tetapi laju penurunan angka penduduk miskin cenderung melambat, termasuk di perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam penanganan masalah fakir miskin di wilayah perkotaan. Penelitian dilakukan di dua kota, Tomohon dan Manado di Provinsi Sulawesi Utara. Subjek penelitian adalah seluruh Kube yang dibentuk tahun anggaran 2013 di dua kota tersebut, yaitu sebanyak 10 Kube di Tomohon dan 60 Kube di Manado. Pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan FGD, pada bulan Mei dan Juli 2016. Dalam prakteknya hanya sebanyak sembilan Kube di Tomohon dan 52 Kube di Manado yang dapat ditemui. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kinerja Kube relatif belum cukup baik. Sebagian besar Kube sudah tidak aktif 77,8 persen di Tomohon dan 90,4 persen di Manado. Kube yang masih aktif dua unit di Tomohon dan lima unit di Manado. Lebih dari setengah sudah tidak aktif sebelum ulang tahun pertama. Ada lima alasan utama yang membuat Kube tidak aktif (bubar), yaitu usaha mengalami kerugian, anggota enggan melanjutkan usaha bersama, bencana alam, dan perbedaan pendapat. UEP mengalami kerugian karena tiga faktor, yaitu biaya produksi tinggi, tidak ekonomis, pengaruh cuaca. Kube yang masih bertahan ternyata juga kurang mampu memberi penghasilan tambahan yang signifikan bagi anggotanya. Secara keseluruhan kinerja Kube di dua kota tersebut belum memadai untuk mengentaskan penduduk miskin. Rendahnya kinerja Kube terjadi karena rangkaian proses pelaksanaan program belum dilakukan dengan profesional, cenderung berorientasi penyelesaian administratif semata. Menejemen proyek belum melakukan pengendalian teknis substansi kegiatan dengan baik pada semua tahapan.

Kata kunci: Kinerja; Kelompok Usaha Bersama (Kube); Penanganan Fakir Miskin.

A. Pendahuluan

Penduduk miskin Indonesia masih cukup tinggi, tahun 2015 mencakup 28.51 juta jiwa (11.13 persen) dari total penduduk. Angka ini merupakan prestasi yang berhasil dicapai dari keseluruhan upaya yang dilakukan oleh bangsa ini. Upaya pengurangan kemiskinan melalui program pembangunan pada umumnya maupun melalui program yang khusus ditujukan untuk pengentasan penduduk miskin sudah dilakukan sejak lama. Jumlah penduduk miskin berfluktuasi, awal pembangunan tahun 1976 meliputi 40,01 persen (54,2 juta jiwa). Pada masa orde baru pencapaian terbaik terjadi pada tahun 1996, yaitu 11,7 persen (22,5 juta jiwa). Angka terendah yang pernah dicapai dalam 10 tahun terakhir sebesar 11,37 persen, yaitu pada tahun 2013 dan 10,96 persen pada Septembver 2014. Akan tetapi secara garis besar sejak 2010 persentasi penduduk miskin selalu berkisar 11 sampai 13 persen (BPS, 2015). Bangsa Indonesia bertekad berupaya terus mengentaskan penduduk dari kemiskinan. Pada pemerintahan priode 2009-2014, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi semakin terpadu. TNP2K diketuai oleh Wakil Presiden RI. Salah satu langkah strategis yang sudah berhasil dilakukan adalah pengintegrasian data penduduk miskin secara nasional, dikenal dengan Basis Data Terpadu (BDT).

Pemerintah saat ini, periode 2014-2019, bertekad menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi tujuh atau delapan persen pada tahun 2019. Terkait hal tersebut diterbitkan Perpres No.166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulang-an Kemiskinan, pada intinya pemerintah menyelenggarakan program perlindungan sosial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan sosial dimaksud meliputi: 1) Program Simpanan

keluarga Sejahtera (dengan Kartu Keluarga Sejahtera); 2) Program Indonesia Sehat (Kartu Indonesia Sehat); 3) Program Indonesia Pintar (dengan Kartu Indonesia Pintar). Kementerian Sosial (Departemen Sosial) sejak dibentuk pada tahun 1946 memiliki tugas terkait langsung dengan penanganan penduduk miskin, tepatnya fakir miskin. Sejak tahun 2011 tugas ini telah memiliki landasan hukum yang kuat dengan disahkannya Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin.

Program Kementerian Sosial untuk penanganan fakir miskin dari waktu ke waktu selalu disempurnakan. Salah satu komponen penting program adalah bantuan (stimulan) sosial kepada penerima manfaat. Bantuan tersebut digunakan oleh fakir miskin (FM) sebagai modal usaha ekonomi produktif (UEP). Dari usaha tersebut diharapkan FM memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Sejak 1984 kegiatan dilakukan dengan pendekatan kelompok, setiap penerima manfaat “didorong” bergabung dalam kelompok yang disebut kelompok usaha bersama (Kube). Kube adalah kelompok penerima manfaat program dengan sebanyak 10 orang anggota. Kube merupakan media dan sekaligus metode dalam penanggulangan kemiskinan perkotaan (Kementerian Sosial, 2015). Asumsinya, penanganan FM melalui kelompok (Kube) lebih efektif dari pada penanganan secara individual. Kegiatan Kube meliputi aspek sosial dan ekonomi. Dalam aspek ekonomi Kube diharapkan menolong anggotanya hingga memiliki sumber penghasilan tetap (Kementerian Sosial, 2011; 2015).

Bappenas (2014) memahami Kube sebagai satu program pemberdayaan sosial yang dilakukan melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin untuk melaksanakan usaha ekonomi produktif serta usaha kesejahteraan sosial. Menurut Bappenas (2014): Kube memiliki tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan daya masyarakat miskin melalui peningkatan kemampuan berusaha anggota Kube secara bersama dalam kelompok, peningkatan

pendapatan, pengembangan usaha, dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara anggota Kube dan dengan masyarakat sekitar. Bentuk kegiatan dalam program Kube di antaranya pelatihan, keterampilan berusaha, pemberian bantuan dana stimulan sebagai modal kerja atau berusaha, serta program pendampingan.

Persoalannya ada indikasi kuat bahwa kinerja Kube masih belum cukup handal. Pada tahun 2011, Bappenas mempersoalkan Kube dengan serius, bahkan sempat diancam tidak diberi alokasi dana (Marzuki, 2011). Ancaman tersebut didasarkan pada hasil *spot check* Bappenas di Kota Malang, Kota Kendari dan Kabupaten Pasuruan. yang menunjukkan bahwa Kube tidak efektif (Suradi, 2012; Bambang Nugroho, 2013). Empat tahun setelah itu, pada bulan Mei 2015, penulis melakukan pengecekan (monitoring dan evaluasi) Kube Program Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Hasilnya menunjukkan, program masih belum cukup efektif. Dari 10 Kube yang dibangun pada tahun anggaran 2014 di dua desa di Kecamatan Sanaman, Mantikel yang menjadi subjek evaluasi ternyata tidak satu pun Kube yang berhasil (Sitepu, A., 2015).

Didorong oleh semangat memperbaiki program penanganan FM, penulis (Sitepu, A., 2016) telah melakukan penelusuran, ditemukan sebanyak 15 karya tulis ilmiah (KTI) yang membahas kinerja Kube, yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2006-2015). Seluruh karya tulis tersebut ditelaah, hasilnya senada, menunjukkan bahwa Kube tidak bertahan lama, usaha ekonomi yang dibangun tidak berkembang seperti diharapkan, kegiatan kelompok terhenti. Artinya, Kube tidak dapat mewujudkan misinya, sehingga dapat disimpulkan Kube belum cukup efektif sebagai instrumen penanganan fakir miskin. Diduga oleh sebab penanganan kemiskinan menjadi salah satu agenda prioritas nasional pada periode pemerintahan 2009-2014, Kube tidak masuk dalam program nasional yang disebut

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Hal ini sebenarnya merupakan suatu ironi khususnya bagi Kementerian Sosial karena sejak awal sudah berkecimpung dalam penanganan kemiskinan dan memiliki landasan hukum untuk melakukan tugas tersebut.

Periode pemerintahan 2014-2019, sesuai kontrak kinerja Menteri Sosial dengan Presiden RI, Kementerian Sosial diminta memberi kontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin. Persoalannya apakah Kube, sebagai instrumen utama Kementerian Sosial untuk penanganan FM, cukup handal memberdayakan FM? Kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena hingga sejauh ini belum tampak upaya penyempurnaan signifikan. Pada sisi lain, secara organisasi Kementerian Sosial relatif sudah siap, sudah dibentuk satu unit kerja khusus setingkat eselon I untuk penanganan FM, yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Kemiskinan. Organisasi ini meliputi tiga unit kerja yang fokus pada penanganan kemiskinan di wilayah spesifik, yaitu perkotaan, perdesaan dan pulau-pulau terluar, perbatasan antarnegara dan terpencil.

Dalam upaya penyempurnaan program Kementerian Sosial untuk penanganan FM, Puslitbang Kesos melakukan evaluasi kinerja Kube, khususnya di wilayah perkotaan. Pertanyaannya: Bagaimana kinerja Kube dalam penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan? Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Kube di perkotaan? Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai masukan dalam penyempurnaan program penanganan FM, melengkapi penelitian sebelumnya.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua kota, Tomohon dan Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Subjek penelitian adalah seluruh Kube yang dibentuk pada tahun 2013 di dua kota tersebut. Pemilihan kedua kota tersebut dilakukan secara *purposive* untuk memperoleh gambaran kinerja Kube dalam penanganan FM di perkotaan. Hasil kajian di dua kota tersebut tidak dapat

merepresentasikan Kube di seluruh kota, tetapi sekurangnya mewakili dirinya sendiri, walau pun demikian dipandang penting sebagai potret selintas bagi Kube secara keseluruhan. Kota Manado dan Tomohon dipilih secara sengaja dengan pertimbangan sedikit atau banyak mencerminkan wilayah perkotaan Indonesia di bagian timur. Kube tahun 2013 dipilih dengan pertimbangan sudah berusia sekitar tiga tahun. Pada usia tersebut Kube diharapkan sudah berkembang, tujuan sudah tercapai dan masa pendampingan berakhir. Artinya, pada usia tiga tahun keberhasilan atau kegagalan Kube sudah dapat dilihat nyata.

Subjek penelitian meliputi 70 Kube, dengan rincian sebagai berikut. Kota Tomohon 10 unit dan Kota Manado 60 unit. Menurut latar belakang penerima manfaat program (anggota), Kube dimaksud terdiri atas dua kategori, Kube reguler (30 unit) dan Kube PKH (40 unit). Seluruh Kube PKH terdapat di Kota Manado. Kube reguler adalah Kube yang anggotanya terdiri dari kepala keluarga fakir miskin. Kube PKH adalah Kube yang anggotanya terdiri dari kepala keluarga miskin penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Kube PKH sesungguhnya merupakan rintisan baru karena belum pernah dilakukan sebelumnya. PKH adalah sebuah program *conditional cash transfer* (CCT), pesertanya diberi bantuan sosial berupa uang tunai secara rutin dalam jangka panjang untuk tujuan perbaikan kesehatan dan peningkatan pendidikan anak. Penerima manfaat PKH yang menjadi penerima manfaat program penanganan FM atau menjadi anggota Kube adalah mereka yang sudah menerima bantuan CCT dalam jangka waktu relatif panjang, sekitar 10 tahun. Mereka dikategorikan dalam kondisi transisi menuju kemandirian. Mereka diikuti dalam Program Pengentasan FM dengan tujuan agar segera terentaskan dari kemiskinan.

Unit analisis penelitian ini adalah Kube. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, pada bulan Mei 2016. Seluruh subjek penelitian ini merupakan bagian dari 1.910 Kube yang dibentuk Direktorat Penanganan Kemiskinan

Perkotaan (Direktorat PKP) Kementerian Sosial pada tahun anggaran 2013, yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia. Data dan informasi diolah dengan teknik kualitatif, dinarasikan dalam bentuk kasus kemudian dikategorisasi, ditabulasi dan ditafsirkan hingga ditemukan maknanya.

Tabel 1. Kube Program Penanganan Fakir Miskin di Kota Tomohon dan Manado 2013

No	Kota	Kube		
		Reguler	PKH	Jumlah
1	Tomohon	9	0	9
2	Manado	17	35	52
Jumlah		26	35	61

Sumber: Hasil Wawancara (N=61)

Dalam pelaksanaan pengumpulan data ternyata tidak semua subjek dapat ditemui. Dari sebanyak 70 Kube di dua kota lokasi hanya sebanyak 61 Kube dapat ditemui, sementara sebanyak 9 Kube tidak dapat ditemui (lihat tabel 1). Kube yang tidak dapat ditemui adalah satu di Kota Tomohon dan 8 Kube di Kota Manado. Pendamping daerah yang terdiri dari aparat instansi sosial kota setempat yang bertugas mengantar peneliti tidak berhasil menghubungi mereka atau keengganan pengurus untuk bertemu. Hal ini merupakan indikasi bahwa sembilan Kube yang tidak berhasil ditemui memang sudah tidak aktif.

C. Kinerja Kube Perkotaan

1. Penggunaan Bantuan Modal Usaha

Komponen penting Program Penanganan FM, termasuk penanganan FM di wilayah perkotaan adalah bantuan modal usaha (BMU). Bantuan modal usaha diberikan kepada setiap penerima manfaat sebesar Rp 2.000.000,- atau sebesar Rp 20.000.000,- per Kube, dengan 10 orang anggota. Sesuai namanya BMU dimaksud untuk digunakan oleh kelompok sebagai modal usaha ekonomi produktif (UEP). BMU sering juga disebut *stimulan*. Dalam implementasinya, BMU digunakan oleh kelompok dalam tiga pola berbeda. Pertama, semua bantuan digunakan un-

tuk modal satu usaha UEP, yaitu membeli barang dagangan; alat kerja; bahan olahan; modal kerja; ada uang *cash* di pengurus; membangun sarana tempat usaha. Kedua, bantuan digunakan untuk dua kegiatan, yaitu: Sebagian BMU untuk modal UEP (beli barang untuk disewakan, alat kerja, bahan olahan, modal kerja, membangun sarana tempat usaha); dan sebagian dibagi atau dipinjamkan kepada anggota. Ketiga, bantuan tidak digunakan untuk modal usaha bersama, tetapi dibagi langsung kepada anggota. Pembagian dapat dikelompokkan menjadi dua, dalam jumlah sama besar, rata Rp.2.000.000; Dalam jumlah bervariasi, berbeda satu dengan yang lain.

Tabel 2. Kube di Kota Tomohon dan Manado Menurut Penggunaan Dana Stimulan

No	Kota	Penggunaan Dana			Jumlah
		UEP	UEP+	Dibagi	
1	Tomohon	9	0	0	9
2	Manado	43	7	2	52
Jumlah		52	7	2	61

Sumber: Hasil Wawancara (N=61)

Keterangan:

UEP = usaha ekonomi produktif; UEP+ = sebagian untuk usaha ekonomi produktif Kube dan sebagian lain dibagi

Di Kota Tomohon dari sembilan Kube yang dikunjungi ternyata semuanya menggunakan BMU sesuai peruntukannya sebagai modal usaha (UEP) bersama. Di Kota Manado, penggunaan BMU relatif bervariasi, dari 52 Kube sebanyak dua Kube menggunakannya untuk kepentingan individual. Artinya uang langsung dibagi habis, Kube tidak membentuk usaha (UEP) bersama. Sebanyak tujuh Kube menggunakan uang untuk dua kepentingan, modal usaha bersama (UEP) kelompok dan sebagian lainnya dibagi kepada anggota (Tabel 2).

2. Bidang Usaha Ekonomi

Bidang usaha ekonomi Kube cukup bervariasi, sebagai contoh di Kota Manado: Ternak (babi/ayam/budidaya ikan); *catering*; penyewaan alat pesta (tenda, kursi dan peralatan masak); petani (sayur, bunga); warung sembako; usaha

(membuat) kue; bengkel mobil; warung makan/lauk jadi; beli-jual ikan; usaha foto *copy*; penjahit; nelayan). Secara keseluruhan di dua kota lokasi, dapat dikelompokkan menjadi enam bidang, yaitu usaha dagang; usaha penangkapan ikan; usaha tani; usaha pengolahan (produksi); aneka usaha; dan jasa. Usaha dagang mencakup warung sembako, warung nasi, warung makanan dan minuman, jual ikan segar dan sejenisnya. Penangkapan ikan meliputi semua usaha penangkapan hasil laut seperti penangkapan kerang dan kepiting. Tani meliputi seluruh usaha bercocok tanam (seperti sayur dan bunga) dan usaha ternak (ayam, babi, kambing dan lainnya) serta budidaya ikan (lele, mujahir dan sejenisnya). Produksi meliputi pengolahan seperti pembuatan keripik, kue, sablon, pembuatan sangkar burung, bunga imitasi. Aneka usaha agak berbeda dengan yang lain. Aneka usaha yang dimaksud atau yang riil di lapangan adalah usaha individual anggota, dana stimulan dibagi kepada anggota, kemudian digunakan untuk modal atau tambahan modal usaha individual atau keluarga. Jasa yang dimaksud adalah penyewaan alat pesta (tenda, kursi, alat masak) lainnya adalah *fotocopy*.

Tabel 3. Banyaknya Kube di Kota Tomohon dan Manado Menurut Bidang Usaha UEP

No	Kota	Bidang Usaha UEP Kube						Jumlah
		A	B	C	D	E	F	
1	Tomohon	0	0	6	0	0	3	9
2	Manado	7	1	3	16	14	11	52
Jumlah		7	1	9	16	14	14	61

Sumber: Hasil Wawancara (N=61)

Keterangan:

A= dagang; B= nelayan; C= tani; D= kerajinan; E= aneka usaha; F= jasa

Persebaran Kube di masing-masing kota menurut bidang usaha yang dibangun dengan menggunakan dana stimulan dari pemerintah (tabel 3). Di Kota Tomohon dari sembilan Kube, enam Kube (66,7 persen) menyelenggarakan usaha UEP bidang usaha tani, dan tiga Kube lainnya bidang usaha jasa. Di Kota Manado bidang usaha yang paling banyak dilakukan Kube adalah

kerajinan atau pengolahan seperti pembuatan kue basah atau kue kering dan keripik, 16 (30,7 persen) dari 52 Kube, 14 Kube (26,9 persen) menyelenggarakan usaha bidang aneka usaha, 11 Kube usaha jasa dan delapan lainnya melakukan usaha dagang.

3. Eksistensi Kube

Menurut aktifitas kegiatan usaha dan kelengkapan anggotanya, kondisi Kube pada saat dikunjungi dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, aktif dengan anggota lengkap; aktif dengan anggota tidak lengkap; dan tidak aktif (bubar). Penjelasan masing-masing. Kube aktif dengan anggota lengkap, berarti usaha (UEP) Kube masih operasional dan anggota masih tetap sebanyak 10 orang. Walaupun demikian bukan berarti asetnya sudah berkembang, dalam sejumlah kasus justru nilai asetnya sudah lebih kecil dari nilai bantuan stimulan karena skala usaha kurang ekonomis. Anggota yang terlibat dalam menjalankan kegiatan tidak selalu seluruhnya, tetapi secara formal seluruh anggota masih diakui. Kube aktif dengan anggota tidak lengkap, berarti sama seperti Kube aktif dengan anggota lengkap, usaha (UEP) Kube masih operasional, perbedaannya pada Kube ini anggota kurang dari 10 orang, biasanya tiga sampai empat orang. Nilai aset biasanya juga sudah lebih kecil dari nilai stimulan yang diterima. Kube tidak aktif, berarti Kube sudah tidak memiliki kegiatan bersama. aset baik berupa barang, alat maupun uang sudah habis dibagi kepada anggota. Pada umumnya pengurus dan anggota sepakat mengatakan atau mengakui bahwa Kube sudah bubar.

Tabel 4. Kube di Kota Tomohon dan Manado menurut Keaktifan dan Kelengkapan Anggota

No	Kota	Kondisi Kube			Jumlah
		Aktif AL	Aktif ATL	Tidak Aktif	
1	Tomohon	11,1	11,1	77,8	100
2	Manado	1,9	7,7	90,4	100

Sumber: Hasil Wawancara (N=61)

Keterangan:

AL = anggota lengkap; ATL = anggota tidak lengkap

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa setelah dibentuk pada akhir tahun 2013 ternyata hanya sejumlah kecil Kube yang masih aktif (Tabel 4). Di Kota Tomohon dari 10 Kube yang dibentuk, sebanyak sembilan Kube dapat dikunjungi. Dari sembilan Kube tersebut hanya satu Kube (11,1 persen) yang masih aktif dengan anggota lengkap dan satu Kube (11,1 persen) aktif dengan anggota tidak lengkap, lainnya tujuh Kube sudah bubar. Di Kota Manado dari 60 Kube yang dibentuk tahun 2013 dapat dikunjungi sebanyak 52 Kube. Dari 52 Kube yang dapat dikunjungi, hanya sebagian kecil yang masih bertahan, yaitu sebanyak satu Kube (1,9 persen) dengan anggota lengkap dan empat Kube (7,7 persen) dengan anggota tidak lengkap, lainnya sebanyak 46 Kube (90,4 persen) sudah bubar.

Tabel 5. Kube Aktif di Kota Tomohon dan Manado Menurut Bidang Usaha UEP

No	Kota	Bidang Usaha UEP Kube						Jumlah
		A	B	C	D	E	F	
1	Tomohon	0	0	1	0	0	1	2
2	Manado	1	0	0	1	0	3	5
Jumlah		1	0	1	1	0	4	8

Sumber: Hasil Wawancara (N=61)

Keterangan:

A=dagang; B=nelayan; C=tani; D= kerajinan; E= aneka; F= jasa

Tabel 5, dari lima Kube yang masih aktif di Kota Manado, menurut bidang usahanya terdiri dari dagang (satu unit), kerajinan (pembuatan kue) (satu unit) dan jasa (catering) (tiga unit). Melihat persebaran Kube menurut bidang usahanya seperti terlihat pada tabel 3, tampak bahwa Kube yang bubar nyaris merata pada semua bidang usaha, yang sedikit menonjol adalah bidang usaha jasa, pada awal pembentukan ada 11 Kube, pada saat diobservasi masih bertahan tiga Kube.

Variabel lain yang penting ditelusuri adalah variabel latar belakang anggota Kube. Seperti telah diuraikan di atas, Kube subjek penelitian menurut latar belakang anggotanya terbagi dalam dua kategori, yaitu Kube regular dan Kube

PKH. Di Kota Tomohon tidak ada Kube PKH, sementara di Kota Manado pada tahun 2013 dari sebanyak 60 Kube yang dibentuk, Kube PKH meliputi sebanyak 40 unit dan lainnya 20 unit Kube reguler. Dari 40 unit Kube PKH, sebanyak 35 Kube dapat ditemui, ternyata yang masih aktif hanya tiga Kube (7,5 persen dari total populasi), sebanyak 32 Kube PKH lainnya sudah bubar.

Dalam anggapan umum, Kube PKH memiliki banyak kelebihan, sehingga harapan untuk eksis dan berhasil mencapai tujuannya relatif jauh lebih tinggi. Temuan lapangan di Kota Manado ini menunjukkan bahwa kondisinya tidak berbeda jauh. Persentase Kube reguler yang bertahan meliputi 10 persen (dua dari 20 Kube), sementara Kube PKH yang bertahan meliputi tiga dari 40 unit atau 7,5 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa anggapan umum selama ini yang memandang Kube PKH lebih unggul dari Kube reguler ternyata tidak terbukti, pada kasus Kube perkotaan yang dibentuk tahun 2013 di Kota Manado. Kenyataan ini menolak anggapan yang beredar, Kube PKH karena anggotanya sudah sekitar 10 tahun menjadi penerima CCT, dan juga sudah bergabung dalam kelompok PKH, serta memperoleh pendampingan, diyakini akan lebih eksis.

Fakta di Kota Manado menunjukkan lain, justru persentase Kube tidak aktif sedikit lebih tinggi pada Kube PKH dibanding Kube reguler, 92,5 : 90 persen. Akan tetapi sebagai perbandingan perlu diinformasikan temuan berbeda seperti dilaporkan oleh Togiaratua (2016), yang melakukan penelitian terbatas di sebuah nagari di Sumatera Barat. Dia menemukan dari lima Kube PKH di desa tersebut sebanyak empat di antaranya berkembang dengan baik. Kelima Kube menyelenggarakan usaha simpan pinjam, menurut Togi 4 Kube tersebut mampu menjalankan fungsi sebagai media bantu diri (*self help group*) bagi anggotanya.

4. Lama Kube Bertahan

Di Kota Tomohon dari sebanyak 10 Kube yang dibentuk tahun 2013, sembilan Kube da-

pat dihubungi. Kemudian dari sembilan Kube yang berhasil ditemui, hanya dua Kube yang masih aktif, lainnya tujuh Kube sudah bubar. Di Kota Manado pada tahun yang sama dibentuk 60 Kube, ketika dilakukan pengecekan tahun 2016, 52 Kube dapat ditemui. Dari 52 Kube yang ditemui, hanya Kube yang aktif, yang lainnya 46 Kube sudah bubar. Berikut ini diuraikan pada usia berapa bulan Kube bubar.

Tabel 6. Kube tidak aktif di Kota Tomohon dan Manado menurut Lama Usia Bertahan

No	Alasan Kube bubar	Manado (persen)	Tomohon (persen)
1	Usaha rugi	53,2	71,4
2	Bencana alam	6,4	14,3
3	Dikelola seorang	12,7	0,0
4	Ingin usaha sendiri	21,3	0,0
5	Kesibukan anggota	6,4	14,3
Jumlah		100,0	100,0

Sumber: Hasil Wawancara (N=61)

Tabel 6 memperlihatkan baik di Manado maupun Tomohon, lebih dari setengah populasi Kube sudah bubar sebelum ulang tahun pertama. Di Kota Tomohon, empat Kube sudah bubar pada rentang usia 0 – 6 bulan; kemudian tiga Kube bubar pada usia 7 – 12 bulan. Di Kota Manado, 29 Kube bubar pada usia 0 – 6 bulan, dan delapan Kube bubar pada usia 7 – 12 bulan. Kube yang masih aktif hingga bulan Mei 2016 (usia sekitar 30 bulan) di Kota Tomohon dua unit dan di Kota Manado lima unit kondisinya belum aman. Temuan penelitian ini senada dengan hasil penelitian 16 tahun yang lalu yang dilakukan oleh Nugroho (2013), yang menunjukkan bahwa daya tahan Kube tidak lebih dari enam bulan (*footnote*). Hal ini memprihatinkan karena dalam kurun waktu sepanjang itu dapat hampir belum ada perbaikan signifikan.

Mencermati kasus-kasus Kube yang sudah bubar, dapat diidentifikasi lima faktor penyebab Kube bubar, yaitu usaha ekonomi mengalami kerugian (bangkrut) bencana alam, dikuasai seseorang, anggota ingin usaha sendiri atau kesibukan anggota. Kadar usaha UEP rugi (57,1

persen), dan anggota ingin berusaha sendiri (17,6 persen), kesibukan anggota dan perbedaan pendapat (5,5 persen); bencana alam (5,5 persen).

Tabel 7. Alasan Kube tidak aktif di Kota Tomohon dan Manado

No	Kota	Lama Usia Kube				Jumlah
		A	B	C	D	
1	Tomohon	57,1	42,9	0,0	0,0	100
2	Manado	61,7	17,0	14,9	6,4	100

Sumber: Hasil Wawancara (N=61)

Keterangan: A= 0-6 bulan; B= 7-12 bulan; C= 13-18; D= 19 < bulan

5. Kinerja Kube Aktif

Di Kota Tomohon ada dua Kube yang dikategorikan masih aktif, yaitu Kube Setia (regular) Karya, di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, dengan usaha catering; dan Kube Kinamang di Kelurahan Pangolombi-an Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, dengan usaha tani (tanam sayur, seperti cabe, jagung dan ketimun). Kedua Kube di Kota Tomohon ini berhasil, selain memberi penghasilan tambahan bagi anggotanya juga menambah aset, berupa peralatan kerja. Kube Setia Karya, penghasilan tambahan diperoleh dengan sistem upah dan keuntungan. Anggota yang memperoleh pesanan bertindak sebagai koordinator pelayanan. sementara anggota lainnya membantu seluruh proses, mulai dari belanja, mengolah, menghidangkan sampai merapikan kembali peralatan. Mereka mampu memperoleh pesanan secara berkesinambungan, bahkan seringkali melayani beberapa *even* dalam hari yang sama. Margin yang diperoleh juga memadai, 30 persen dari nilai omset. Sebagai contoh: pada *even* dengan pesanan 250 porsi dengan harga standar Rp 35.000 per porsi, koordinator dapat memperoleh Rp 2.500.000.

Anggota memperoleh Rp 500.000, dengan empat hari kerja. Menurut ketua Kube, pesanan sangat memadai, bahkan kerap terjadi dalam sehari melayani lebih dari satu *even*. Kube Kinamang yang berusaha dalam bidang cocok tanam,

anggotanya juga sudah menikmati hasil, walau belum sebesar hasil yang diperoleh Kube Setia Karya. Anggota Kube Kinamang memperoleh pembagian hasil pada saat panen. Sesuai informasi yang diperoleh, sekurangnya setiap panen masing-masing anggota dapat pembagian Rp 200.000,-

Di Kota Manado terdapat lima Kube aktif, yaitu Kube (regular) Kasih di Kecamatan Tikala, bidang usaha catering; Kube (regular) Annisah di Lingkungan VII, Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, dengan usaha pembuatan kue; Kube (PKH) Esa Waya di Lingkungan V Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Tikala, dengan usaha catering masakan masakan khas Minahasa; Kube (PKH) Agnes, di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget, bidang usaha penyewaan alat *catering*; dan Kube (PKH) Mandiri, usaha warung sembako.

Kinerja Kube di Kota Manado relatif belum cukup optimal. Kube Kasih dengan anggota tersisa empat orang Kube berhasil memberi penghasilan tambahan bagi empat orang anggotanya yang masih tersisa. Menurut Ketua, Jolly, rata-rata dalam sebulan mereka berempat memperoleh penghasilan satu juta rupiah. Jolly mengaku ada saja pesanan. Sebagai contoh, sepanjang bulan Mei order sebanyak 300 porsi @ seharga Rp 35.000 total nilai Rp10.500.000,- keuntungan 50 persen = Rp 5.000.000. Untung langsung dibagi rata untuk empat orang masing-masing memperoleh sebesar Rp 1.250.000,-.

Kube (regular) Annisah di Lingkungan VII, Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Anggotanya tinggal tiga orang yang lainnya sudah tidak aktif. Kube ini sudah berhasil memasarkan hasil secara rutin ke toko oleh-oleh terbesar. Hasil yang dinikmati anggota adalah upah sebesar Rp 50.000 per hari khusus bagi anggota yang ikut bekerja.

Kube (regular) Esa Waya yang memiliki usaha catering, oleh ketuanya diakui telah dirasakan membantu anggota. Sejak Kube ini didirikan tahun 2013 (30 bulan) saldo kas baru mencapai 1 juta, mengingat usaha ini belum banyak dike-

nal oleh masyarakat luas. Namun bagi anggota dirasakan sudah membantu karena setiap ada pesanan mereka memperoleh pembagian.

Kube (PKH) Agnes yang terletak di Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado dengan usaha penyewaan alat catering. Menurut Ketua Kube bernama Agnes Warow, kegiatan Kube masih aktif. Saldo kas yang dimiliki sebanyak empat juta. Anggota yang masih bergabung tujuh orang. Sedangkan tiga orang lainnya sudah tidak aktif karena sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sesuai kesepakatan hasil penyewaan alat *catering* disimpan di kas, sedangkan anggota yang menggunakan peralatan *catering* gratis. Namun hingga Kube berusia 30 bulan anggota belum dapat memperoleh penghasilan tambahan.

Kube (PKH) Mandiri di Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Usaha yang dikembangkan Kube ini adalah warung sembako. Sebagian hasil keuntungan kegiatan ini digunakan untuk pengembangan usaha, dan sebagian dibagikan kepada anggota. Hingga sejauh ini telah dibagikan kepada anggota sebanyak dua kali. Setiap pembagian masing-masing memperoleh antara Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,- per anggota.

Di Kota Manado terdapat 47 Kube yang bubar. Hampir setengahnya (48,7 persen) anggota tidak memperoleh apa-apa dari kepesertaan mereka dalam program. Hal ini terjadi karena asetnya habis atau masih di tangan pengurus. Sebagian lain (51,3 persen) Kube yang bubar, asetnya baik uang maupun barang, dibagi kepada anggota. Artinya, keluarga fakir miskin masih menerima manfaat walaupun nilainya jauh lebih kecil dari nilai stimulan sebesar dua juta rupiah.

Menyimak data seperti diuraikan di atas, jelas bahwa kinerja Kube di Kota Tomohon dan Manado masih buruk, belum cukup berhasil melaksanakan misinya. Kebanyakan Kube belum berhasil menyelenggarakan UEP yang dibentuk dengan bantuan modal dari pemerintah. Artinya, anggota Kube belum berhasil bekerjasa-

ma menjadikan UEP sebagai sumber tambahan penghasilan berkelanjutan. Kebanyakan Kube bubar, bahkan lebih dari setengah bubar sebelum ulang tahun pertama (lihat tabel 4). UEP Kube yang masih eksis juga tidak semua produktif. Program penanganan fakir miskin melalui Kube yang dilakukan tahun 2013 di dua kota tersebut dapat dinyatakan belum berhasil.

Temuan ini menguatkan hasil kajian sebelumnya yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder (Anwar Sitepu, 2016) seperti disinggung pada bagian pendahuluan. Salah satu dari 15 KTI yang membahas kinerja Kube adalah tulisan Joyakin Tampubolon (2006). Dia mengungkapkan, keberhasilan aspek ekonomi sebagian besar (95,5 persen) Kube berada pada kategori *sangat rendah*. Temuan penelitian ini dan rangkaian temuan sebelumnya merupakan sinyal kuat yang mengindikasikan ada persoalan serius pada program penanganan FM yang dilakukan Direktorat PKP Kementerian Sosial melalui Kube. Temuan penelitian ini juga mengandung makna bahwa hingga sekarang upaya perbaikan program belum berhasil. Kube belum mampu menjalankan fungsi sebagai instrumen penanganan FM.

Pendekatan kelompok yang diwujudkan dalam Kube yang selama ini diyakini efektivitasnya ternyata pada kasus dua kota ini belum ditemukan buktinya. Maknanya, berbagai pertimbangan seperti diuraikan dalam Pedoman (Kementerian Sosial, 2015) yang digunakan untuk menjadikan Kube sebagai media penanggulangan kemiskinan hanya sebatas asumsi semata. Kube yang menurut Muhtar (2016) memiliki potensi modal sosial yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ternyata belum dapat diwujudkan menjadi sumber. Kube yang menurut Suradi (2012) memiliki landasan teoritis menjadi sarana penanggulangan kemiskinan kiranya hanya sebatas teori, dalam prakteknya belum berhasil.

Mencermati kasus-kasus di dua kota teridentifikasi alasan yang menjadi penyebab utama Kube tidak aktif, yaitu UEP merugi, bencana

alam, dikuasai seseorang, anggota ingin usaha sendiri, dan kesibukan anggota. Kategori alasan ini sesungguhnya masih dapat didefenisikan ulang, bencana alam, anggota ingin usaha sendiri dan kesibukan anggota sesungguhnya memiliki roh yang sama yaitu rugi, usaha tidak menguntungkan. Sekiranya usaha bersama mendatangkan keuntungan anggota tidak akan keberatan bergabung dalam kelompok. Demikian juga alasan “sibuk”, apabila usaha bersama mendatangkan keuntungan diyakini anggota akan dengan penuh semangat menyingkirkan kesibukan lain dan aktif dalam kegiatan Kube. Sementara bencana alam memang kejadian di luar kendali manusia tetapi intinya usaha hancur dan rugi. Dengan demikian alasan utama Kube tidak dapat bertahan karena usaha mengalami kerugian, tidak berkembang. Tabel 7 menunjukkan ada dua alasan dominan, yaitu usaha UEP rugi (57,1 persen) dan keinginan anggota untuk berusaha sendiri (17,6 persen). Pertanyaan yang segera muncul adalah mengapa usaha yang dibangun merugi? mengapa anggota lebih menginginkan melaksanakan usaha pribadi dari pada melaksanakan usaha bersama?

Mencermati lima Kube di Kota Tomohon dan 25 Kube di Kota Manado yang tidak aktif karena usaha mengalami kerugian, dapat diidentifikasi tiga faktor penyebab, yaitu biaya produksi mahal; usaha tidak produktif; dan produksi tidak berhasil karena pengaruh cuaca. Berikut penjelasan masing-masing:

Biaya produksi mahal karena mengandalkan sumberdaya luar. Hal seperti ini terjadi antara lain pada usaha ternak babi Kube Maesaan dan Kube Anugrah di Kota Tomohon. Berdasarkan wawancara dengan ketua masing-masing diketahui kerugian terjadi karena harga pakan naik tinggi. Pakan ternak tersebut ternyata seluruhnya diperoleh dengan cara membeli, buatan pabrik, kata mereka supaya cepat besar. Persoalannya harga pakan tinggi sehingga ketika hasil ternak dijual, ternyata tidak memberi keuntungan. Secara teoritis, sebuah usaha yang layak dikembangkan di suatu lokasi adalah usaha

yang berbasis sumberdaya lokal. Dalam kasus ternak babi di Kota Tomohon, seyogyanya pakan utama harus mengandalkan sumberdaya setempat. Dalam prakteknya, kedua Kube beternak dengan mengandalkan pakan buatan pabrik. Padahal menurut pengamatan, lingkungan setempat memiliki potensi memproduksi aneka tanaman yang dapat diolah menjadi pakan babi. Namun pengurus Kube memilih pakan pabrikan dengan alasan supaya cepat besar. Kenyataan ini merupakan indikasi yang mencerminkan, bahwa pelaksanaan program tidak dilakukan dengan baik. Pengurus Kube bisa berpendapat beri pakan buatan pabrik supaya lekas panen, tetapi hasilnya tidak ada. Pada kasus ini tercium aroma, pengurus Kube tidak mau repot, mencari mudahnya saja. Pemikiran ini memberi indikasi lebih dalam, yaitu menyangkut mentalitas, malas, mau memetik hasil dengan sedikit usaha, Kontjaraningrat (1984) menyebut *mentalitas menerabas*. Penyelenggara program seyogianya memberi bimbingan agar UEP menguntungkan. Mengubah mentalitas peserta. Tugas pendamping menjelaskan apa yang akan terjadi jika usaha mengandalkan sumberdaya dari luar.

Usaha ekonomi (UEP) tidak dikelola secara ekonomis, yang dimaksud adalah usaha cenderung sekedar dipajang. Alat dan bahan produksi diadakan dengan bantuan modal usaha (dana stimulan), tetapi tidak terlihat upaya pemasaran atau upaya produksi yang intensif, layaknya usaha. Menyimak kasus-kasus sejenis ini dapat ditemukan dua kategori. Pertama, kategori pajangan, yaitu hanya sebagian kecil dana stimulan digunakan untuk belanja modal usaha bersama, sebagian besar stimulan dibagikan kepada anggota untuk mengembangkan usaha sendiri. Dalam kategori ini, ada kesan bahwa usaha bersama yang dibangun hanya sekedar memenuhi ketentuan program, sehingga usaha lebih sekedar formalitas.

Kategori kedua, macet. Pada kategori ini, sebagian besar uang stimulan digunakan untuk modal usaha bersama. Disebut macet karena setelah sebagian besar uang dibelanjakan untuk alat

atau bahan produksi, usaha tidak bisa dijalankan. Pada kategori ini tidak terlihat motivasi lain. Mereka serius merancang usaha tetapi di tengah jalan menghadapi kendala, seperti persaingan, tidak ada permintaan, kemudian anggota malas dan bubar. Sebagai contoh Kube PKH Mulia di Kota Manado. Kube ini membentuk usaha *catering*. Bantuan yang diterima bulan Desember 2013 Rp 20 juta, digunakan membeli alat-alat catering senilai Rp 11.000.000,-. Hingga penelitian dilakukan Mei 2016, 30 bulan setelah usaha dibentuk, usaha *catering* belum pernah terima pesanan. Oleh karena itu, alat disewakan Rp 150 ribu sekali pakai, dipotong uang cuci Rp 50 ribu. Sejak peralatan dibeli pada bulan Januari 2014 disewakan sebanyak empat kali. Menurut pengurus, persoalan yang dihadapi usaha ini adalah banyak saingan. Ungkapan ini ada benarnya, dari Kube tahun 2013 saja beberapa Kube dengan bidang usaha *catering* dan atau penyewaan alat pesta. Persoalannya, mengapa penyelenggara program membiarkan sejumlah Kube melakukan usaha yang sejenis di wilayah yang sama atau kurang prospektif. Seyogianya, Kube dibimbing dalam penentuan bidang usaha.

Di Kota Manado terdapat sebanyak 47 Kube yang bubar. Hampir setengahnya (48,7 persen) anggota tidak memperoleh apa-apa dari kepesertaan mereka dalam program. Hal ini terjadi baik karena asetnya habis atau masih di tangan pengurus. Sebagian lain (51,3 persen) Kube yang bubar, asetnya baik uang maupun barang, dibagi kepada anggota. Artinya, keluarga fakir miskin masih menerima manfaat walaupun nilainya jauh lebih kecil dari nilai stimulan sebesar dua juta rupiah. Dalam beberapa kasus, bahkan alat dan bahan produksi yang dibeli cenderung kurang proporsional. Contohnya, Kube PKH Srikandi di Kota Manado. Usaha ternak ayam. Uang digunakan untuk beli 30 ekor ayam, seharga Rp. 1.060.000. Rincian sebagai berikut. Indukan sebanyak delapan ekor @ Rp 40.000,- ukuran sedang (disebut *pranggang*) delapan ekor seharga @ Rp 30.000,-; anak 10 ekor; @ Rp 20.000,- jantan empat ekor @ Rp 75.000,- Biaya pem-

buatan kandang Rp 4.500.000,- Selain itu, uang digunakan membeli pakan sebanyak 10 karung, senilai Rp. 2.695.000, dengan rincian sebagai berikut. AD2= 3 karung @ Rp 350.000; AD1= 3 karung @ Rp 350.000; jagung biji =2 karung @ Rp.115.000; jagung beras = 1 karung @ Rp 150.000; jagung pecah =1 karung @ Rp115.000,- Saat dikunjungi, ayam sudah tinggal sembilan ekor, yang lain mati. Ketua mengakui, tidak ada kemajuan penting. Dia menjelaskan, masalah kita sudah runding. Saya sudah atur. Pagi saya kasih makan. Siang dan sore anggota yang seharusnya datang, Tapi tidak ada yang datang. Untung sekarang ini mama saya mau urus. Satu hal yang langsung terasa tidak logis atau aneh pada Kube ini adalah jumlah pakan 10 karung (total 500 kg) sementara ayam yang dipelihara hanya 30 ekor, diperkirakan 30 kg. Sekiranya ayam peliharaan sehat semua, sampai kapan pakan sebanyak 500 kg itu habis dikonsumsi 30 ekor ayam? Kalau pun habis, berapa harga jual ayam supaya biaya produksi bisa kembali?

Ketika ditanyakan kepada ketua, katanya kadang-kadang harga naik. Maksudnya supaya pakan sudah dibeli sebelum terjadi kenaikan harga. Inilah realitas UEP salah satu Kube PKH tahun 2013 di Manado. Pada kasus ini tampak bahwa usaha yang dibangun kurang atau salah perhitungan. Bagaimana perhitungannya memelihara 30 ekor ayam dengan pakan 500 kg. Menyimak kasus-kasus Kube serupa ini, semakin jelas memperlihatkan bahwa pelaksanaan program dilakukan dengan cara kurang profesional. Dalam kasus serupa ini kemungkinan yang terjadi adalah salah sasaran. Orang yang tergabung dalam Kube hanya latah, ikut-ikutan, karena kebetulan memiliki akses. Seorang informan mengatakan, ini (maksudnya: usaha budidaya ikan) tabungan bagi kami. Sewaktu-waktu kami perlu kami bongkar.

Produksi tidak berhasil karena pengaruh cuaca. Misal 1, Kube Karya Bersama di Kota Tomohon. Menerima bantuan stimulan pada bulan Desember 2013. Usaha ekonomi yang dibangun adalah budidaya ikan nila. Dana stimulan yang

diterima digunakan untuk membeli bibit ikan nila sebanyak 7500 ekor, membeli pakan, dan membangun kolam pemeliharaan sebanyak enam buah. Masing-masing kolam berukuran 6 X 10 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Ikan dibesarkan selama empat bulan, setelah itu dijual. Penjualan dilakukan dengan membawa sendiri ke pasar dan sebagian diambil tengkulak di lokasi. Sayangnya penjualan tidak semua berlangsung mulus.

Sampai kunjungan dilakukan Mei 2016 Kube masih belum menerima pembayaran senilai sekitar Rp 6.000.000,-. Harga jual rata-rata Rp 19.000 per kilogram. Setelah panen perdana, walupun tagihan penjualan belum diterima, anggota Kube masih bertekad melanjutkan usaha. Dengan hasil penjualan yang sudah ada, mereka membeli bibit lagi. Tahap kedua ini mereka membeli bibit 5.000 ekor. Akan tetapi tahap kedua Kube gagal panen, bibit ikan yang dilepas kebanyakan mati. Kata ketua, karena kemarau.

Kube menjadi vakum, tidak ada lagi kegiatan. Ketika diminta komentarnya, pengurus mengatakan tidak puas. Ketika didalami, pengurus mengaku dari sepuluh orang anggota memang tidak ada yang berpengalaman melakukan budidaya ikan nila. Misal 2: Kube regular *Mery Gold*. Kota Tomohon. Usaha bertanam bunga krisan. Stimulan diterima Rp 20.000.000 bulan Desember 2013, lewat bank BNI. Digunakan untuk beli bibit bunga dan bangun *green house*, ukuran 4 x 12 meter. Rapat dulu, minggu depannya bulan Januari 2014, baru beli bibit dan menanam. Waktu musim kemarau tujuh bulan, orang mulai usaha sendiri. Kendala musim kemarau, susah air. Panas sekali, air jauh. Tidak ada kendaraan untuk angkut air. Bunga mati. Selain itu, ada penyakit, kutu-kutu, bunga rusak.

Mau jual tidak ada harga. Mulai musim panas, anggota mulai malas-malas. Dari Ketua diketahui, anggota tidak ada yang berpengalaman tanam bunga. Pilihan usaha tanam bunga, karena memang bunga krisan lancar. Acara-acara di sini banyak pakai bunga seperti itu. Kalau bikin sumur perlu biaya Rp 5.000.000,- mesti dekat

air kata orang. Walau hujan tetap perlu disiram dua kali. Dari dua kasus ini tampak bahwa usaha yang dibangun oleh Kube kurangantisipasi, anggota tidak memiliki pengalaman. Makna kasus ini sekali lagi adalah kurangnya perhitunganantisipasi ancaman atas pilihan usaha.

Alasan dominan kedua yang membuat Kube tidak dapat bertahan adalah keinginan anggota untuk berusaha sendiri-sendiri. Berdasarkan pengamatan atas kasus-kasus yang ada, dapat diidentifikasi beberapa sebab yang mendorong anggota lebih menginginkan berusaha secara individual, yaitu usaha bersama tidak memungkinkan individu bebas berkreasi sehingga kelompok dirasakan sebagai hambatan; bergabung dalam usaha bersama kelompok mengekang fleksibilitas pengelolaan uang. Dana stimulan yang diterima dan dikelola kelompok tidak dapat dinikmati secara langsung oleh anggota padahal situasi keuangan keluarganya membutuhkan *cash flow* setiap hari.

Bergabung dalam usaha bersama berarti harus bekerja dalam tim dengan aturan yang ditetapkan bersama. Artinya harus melakukan pekerjaan sesuai kesepakatan kelompok yang kadang-kadang dirasakan tidak sesuai dengan keinginan individu. Bergabung dalam kelompok tidak memungkinkan melibatkan anggota keluarga dalam pengelolaan usaha. Padahal, keluarga kelas bawah memiliki kecenderungan melibatkan anggota keluarga dalam pengelolaan usaha keluarga.

Alasan dominan ketiga Kube bubar adalah dikuasai seseorang. Ditemukan sejumlah Kube ketika bantuan modal usaha digunakan untuk tambahan modal usaha pribadi seseorang, biasanya usaha pribadi ketua. Hal demikian antara lain terjadi pada Kube Annisah; Kube regular Ari Murti (usaha bengkel mobil); Kube Regular X; Kube Regular Kasih Victoria (usaha foto copy dan ATK) semuanya di Kota Manado. Mencermati kasus-kasus Kube serupa ini, tampak bahwa dari awal pembentukan sudah jelas, bantuan modal usaha diniatkan untuk membantu usaha seseorang. Pada kasus-kasus ini anggota hanya

sekedar pelengkap. Kube sesungguhnya tidak pernah terbentuk. Nama anggota hanya sekedar memenuhi syarat administratif. Dalam kasus Kube Kasih Victoria di Manado, nama yang dicantumkan adalah nama murid sebuah sekolah, usia remaja, yang menurut ketua dibantu olehnya agar dapat melanjutkan sekolahnya. Dalam kasus Kube Ari Murti di Kota Manado, anggota adalah anggota keluarga dan pegawai bengkel milik ketua. Dalam kasus Kube Mutiara di Kota Medan, yang bergerak dalam pengolahan hasil laut, nama anggota Kube adalah pekerja. Kube hanya sekedar alat untuk mencairkan bantuan.

Dalam kasus seperti ini jelas bahwa penyelenggara program dengan sengaja kurang peduli dengan ketentuan program atau setidaknya tidak mencermati dengan sungguh-sungguh. Sangat ironis dalam sebuah kesempatan seorang pegawai yang bertugas menyelenggarakan program tanpa merasa bersalah mengatakan: “Ya, tentu kalau ada kesempatan, kita utamakan orang yang kita kenal dulu, Pak ya?” Ungkapan ini tampak polos. Dalam prakteknya memang demikian adanya. Dari informan terungkap bahwa pembentukan Kube dilakukan *sporadic*. Informasi bahwa ada program Kube oleh pegawai disampaikan kepada orang tertentu yang dikenal olehnya. Orang yang mendengar informasi tersebut selanjutnya membuat proposal pembentukan Kube dan diajukan ke Dinas Sosial setempat.

Secara keseluruhan dari kasus-kasus di dua kota lokasi, tampak bahwa kegagalan Kube berakar pada aspek proses pelaksanaan program di lapangan. Pelaksanaan program dilakukan dengan cara kurang profesional, mulai sejak persiapan, pelaksanaan dan pengendalian. Berdasarkan wawancara dengan informan dan diskusi terfokus dengan pihak terkait (Dinas Sosial Kota, Dinas Sosial Provinsi, Pendamping Kube) di dua kota diketahui garis besar pelaksanaan program (pembentukan Kube) tahun 2013 dilakukan sebagai berikut.

Petugas dinas sosial kota menyampaikan informasi kepada orang tertentu, bahwa di lingkungan kantornya ada program Kube. Artinya,

orang yang diberi tahu diberi kesempatan mengajukan proposal. Contoh: Kube reguler Melati di Kota Manado. Ketua, Elsy Truon, mengatakan: “Waktu itu kita dengar di panti. Katanya mau ada Kube, harus bentuk kelompok. Saya berinisiatif (bikin kelompok)”. Kube Reguler Kasih Victoria di Kota Manado, usaha *foto copy*. Terkait awal pembentukan Kube, Ketua Kube Deysi, mengatakan: “ada yang saya kenal (di Dinas Sosial Kota Manado). Saya datang ke Dinas Sosial. Kita ngobrol-ngobrol. Kita orang ada bikin begini. Bagaimana cara? Saya butuh sekali. Anak-anak juga butuh,” Kube Reguler Mekar Mewangi juga di Kota Manado. Bidang usahanya pembuatan bunga imitasi. Informan Elfira, perempuan, ketua Kube, mengatakan: “waktu itu di dinas sosial ada Kube. Kita pe paitua (suami saya) tahu ada program Kube di dinas sosial. Terus kita bikin proposal, sosialisasi di Hotel Sahid.

Orang yang mengetahui ada kesempatan (menerima informasi) menyusun proposal. Menyusun proposal berarti juga mengidentifikasi atau mendaftar orang untuk menjadi anggota Kube. Contoh dalam kasus Kube PKH Bintang Koka di Kota Manado, anggota tidak pernah diajak musyawarah dan bahkan tidak tahu dirinya terdaftar sebagai anggota. Ketika ditanya bagaimana awal pembentukan Kube, Bu Sarmi mengatakan: “kita cuma ikut tanda tangan. Kita dipanggil, suruh tandatangan. Disuruh ketua kelompok, bu L. Dia tidak bilang apa-apa. yang kita tahu dia orang beli kursi seratus lima puluh. “Sarmi mengaku ikut mengambil (mencairkan) uang (stimulan) di Bank. Rostan, seorang ibu setempat penerima manfaat PKH, mengatakan: “sedang saya jadi anggota pun tidak tahu. Saya tahu (ikut anggota Kube) karena kata orang saya anggota.” Lebih jauh ditanya, mengapa beli kursi? Jawabnya: “dari sana suruh beli itu.” ditanya lagi, apakah tidak diajak musyawarah? Jawabnya: “tidak pernah diajak musyawarah.”

Setelah proposal masuk ke dinas sosial. Proposal diteruskan ke Kementerian Sosial cq Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (Direktorat PKP).

Pengarahan kepada pengurus Kube. Pengurus Kube diwakili satu atau dua orang dikumpulkan di satu tempat lalu diberi pengarahan (penjelasan) apa dan bagaimana Kube.

Pencairan bantuan modal usaha (dana stimulan). Pelaksanaan usaha ekonomi produktif (diawali musyawarah kelompok).

Operasional UEP. Pendampingan (bimbingan dan monitoring) oleh pendamping. Monitoring dan evaluasi oleh petugas Kementerian Sosial.

Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan tahun anggaran 2013. Menjelang dana stimulan turun (ditransfer masuk ke rekening Kube), pengurus diberi pengarahan. Pada kesempatan tersebut pengurus Kube diminta membuka rekening di bank mitra (BNI, BRI).

Secara konseptual (Kementerian Sosial, 2015) pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkesinambungan selama empat tahun berturut-turut (disebut T0, T1, T2, dan T3), mulai dengan persiapan, pelaksanaan dan terminasi. Kegiatan pada masing-masing tahap adalah sebagai berikut. Tahap Persiapan (T0), meliputi: identifikasi dan seleksi, hasilnya: daftar penerima manfaat program definitif; orientasi dan observasi, hasil: pemahaman social budaya, permasalahan dan kebutuhan, potensi dan sumber; penyuluhan dan sosialisasi, hasil: penjelasan program; semiloka daerah: memperoleh kepastian jumlah FM dan membuka peluang sinergi; pembentukan Kube; verifikasi administratif proposal: kelengkapan administrative; penjajagan lokasi dan pemetaan kebutuhan: memastikan kelayakan usulan. Tahap Pelaksanaan Kegiatan, dilaksanakan selama tiga tahun. Kegiatan tahun pertama (T1), meliputi: bimbingan/motivasi, pelatihan keterampilan usaha ekonomi, bimbingan teknis pemanfaatan bantuan, pembukaan rekening kelompok, bantuan stimulan, pendampingan, dan moneva. Kegiatan tahun kedua (T2), meliputi: bimbingan/motivasi, pelayanan akses, bimbingan pengembangan usaha, pendampingan, moneva. Kegiatan tahun ketiga (T3), meliputi: bimbingan motivasi, bimtek terminasi, pengakhiran kegiatan, pelimpahan ke pemda, moneva.

Ada beberapa persoalan terkait proses pelaksanaan kegiatan, baik pada tahap persiapan (T0), tahap pelaksanaan (T1, T2 dan T3), proses pelaksanaan kegiatan seperti diuraikan diatas tampak dilakukan secara kurang professional, *sporadic*, tidak ada perencanaan jelas dan sistematis. Pada tahap persiapan misalnya, dinas sosial kota setempat menyampaikan informasi kepada orang yang mereka kenal, tetangga atau teman atau mitra kerja. Orang yang mendengar informasi bertindak sebagai pemrakarsa pembentukan Kube, mencari dan mendaftar anggota dan menyusun proposal. Proposal disampaikan ke Dinas Sosial dan diteruskan ke Direktorat PKP, Kementerian Sosial. Dengan demikian menjadi jelas bahwa implementasi kegiatan di lapangan berbeda dengan yang ditetapkan dalam pedoman. Sejumlah kegiatan yang seharusnya dilakukan ternyata tidak dilakukan. Pada tahap persiapan, kegiatan yang diketahui pasti dilakukan adalah pembentukan Kube; verifikasi administrasi proposal.

Hal lain yang penting dicatat adalah pedoman belum menguraikan masing-masing kegiatan harus dilakukan, belum dilengkapi petunjuk teknis. Misalnya identifikasi dan seleksi, hasilnya daftar penerima manfaat program definitif. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Demikian juga kegiatan lain, orientasi dan observasi, hasil: pemahaman sosial budaya, permasalahan dan kebutuhan, potensi dan sumber; penyuluhan dan sosialisasi, hasil: penjelasan program. Bagaimana teknis pelaksanaannya, perlu didukung dengan petunjuk teknis. Sekali lagi hal ini secara keseluruhan mengandung makna bahwa kegiatan dilakukan dengan cara yang belum profesional, akibatnya belum dapat dipertanggungjawabkan ketepatan sasaran, kesesuaian antara kebutuhan dengan intervensi yang dilakukan. Pada tahap pelaksanaan tahun pertama (T1), kegiatan yang dilakukan adalah bimbingan teknis pemanfaatan bantuan, pembukaan rekening kelompok, bantuan stimulan, pendampingan, dan moneva.

Dari sisi waktu pelaksanaan, menurut skenario dalam pedoman, persiapan dilakukan. Pada

kasus ini seharusnya persiapan dilaksanakan tahun 2012, tetapi dalam prakteknya persiapan dilaksanakan tahun 2013, tahap pelaksanaan (dalam arti realisasi usaha) dilakukan pada bulan Januari tahun 2014.

Kualitas kegiatan jelas kurang memadai, dilihat dari tidak dilaksanakannya sejumlah kegiatan dan dari teknik pelaksanaan sejumlah kegiatan yang dilakukan. Contoh pembentukan Kube, proses yang ditempuh adalah orang yang mendengar informasi bertindak menjadi pemrakarsa. Mereka mengajak sembilan orang lain yang dinilai memenuhi syarat. Pada sejumlah Kube, ada yang mendaftarkan pegawainya menjadi anggota Kube, ada yang mendaftarkan anak-anaknya, ada yang mendaftarkan murid sekolah. Akibat lebih lanjut sasaran program menjadi tidak tepat, sesuai dengan hakikat program, seyogianya penerima manfaat adalah fakir miskin. Dalam pedoman dinyatakan keluarga sangat miskin (KSM) disesuaikan dengan Basis Data Terpadu (BDT). Menilik proses di atas, penetapan peserta belum dikaitkan dengan ketentuan tersebut. Penyelenggara kegiatan cenderung menerima usulan pemrakarsa. Belum ditemukan bukti penyelenggara melakukan seleksi peserta (anggota Kube), sehingga sejumlah Kube jelas belum sesuai dengan ketentuan. Kurang profesionalnya pelaksanaan kegiatan pada tahap persiapan jelas tercermin dari pemilihan bidang usaha, teknik pengelolaan usaha dan penggunaan dana. Kasus Kube di Manado yang memelihara 30 ekor ayam dengan pakan 500 kg adalah satu bukti.

Lebih jauh, pada tahap pelaksanaan sesuai pedoman, semestinya dilakukan latihan keterampilan, dalam prakteknya di dua lokasi belum dilakukan. Realitas ini secara keseluruhan menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan belum dilakukan secara profesional, berawal pada manajemen proyek. Ditjen Dayasos dan PFM sebagai pihak yang bertindak sebagai manajemen seyogianya melakukan pengawasan sejak awal, persiapan hingga pelaksanaan. Apabila pengendalian kegiatan dilakukan dengan baik, manajemen tentu dapat mendeteksi bahwa kegia-

tan persiapan belum dilakukan sesuai ketentuan. Perbaikan pelaksanaan program dengan penunjukan pendamping dengan kontrak selama 2,5 tahun dan pemotongan alur pengajuan proposal dan penyaluran bantuan ternyata belum cukup menjamin kinerja Kube.

Penanggulangan kemiskinan dalam konteks pekerjaan sosial adalah kegiatan intervensi sosial, merupakan kegiatan perubahan berencana, tujuannya harus jelas, demikian pun langkah-langkahnya, pembagian tugas harus jelas dan disepakati serta diperhitungkan dengan cermat. Secara periodik dimonitor dan dievaluasi, kemudian ada langkah-langkah memperbaiki kelemahan. Secara konseptual, penanganan kemiskinan sebagai kegiatan praktek pekerjaan sosial seyogianya fokus pada unit sosial keluarga dan individu di dalamnya. Orang miskin dipahami dalam lingkungan atau situasi sosial yang melingkupinya. Kube hanya sekedar media (alat) agar kegiatan menjadi efektif. Dalam kasus ini Kube belum berhasil menjadi media efektif. Temuan ini tidak berbeda jauh dari apa yang disampaikan Mujiadi (2013) 13 tahun lalu yang mengatakan bahwa walaupun ada kekurangan Kube, lebih disebabkan oleh kekurangjelian memilih bidang usaha/kerja dan pengembangannya. Menurut Mujiadi hal ini berkaitan dengan kinerja pendampingan yang belum optimal. Kelemahan pendamping berawal sejak rekrutmen. Kemampuan pendamping relatif terbatas, peningkatan kapasitas pendamping masih kurang, dukungan operasional bagi pendamping juga tidak memadai, belum memadainya kinerja Kube bersumber dari manajemen pelaksanaan kegiatan program

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Kube dalam rangka penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan seperti ditemukan di Kota Tomohon dan Manado belum sesuai harapan. Sebagian besar Kube belum mampu melaksanakan fungsinya sebagai media penanganan fakir miskin. Usaha ekonomi yang

dibangun dengan modal bantuan pemerintah tidak menghasilkan keuntungan karena berbagai faktor, kemudian bubar. Artinya, Kube sebagai media dan metode penanganan fakir miskin belum terbukti efektif menolong orang atau keluarga FM agar dapat menolong dirinya sendiri, *to help people to help them self*. Bantuan modal usaha atau stimulan belum dapat diolah atau dikelola oleh penerima dalam Kube menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Kube adalah sistem dan manajemen pelaksanaan program; kualitas SDM pelaksana program; dan kualitas SDM peserta program. Sistem dan manajemen pelaksanaan kegiatan *existing* mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pengakhiran kegiatan belum mampu melakukan pengendalian pelaksanaan program, sehingga kualitas *out put* rendah. Dengan sistem dan manajemen yang ada sosialisasi hanya sebatas penyampaian informasi kepada orang tertentu. Dengan sistem yang ada peserta program tidak disiapkan dengan memadai, bidang usaha yang dipilih kurang ditopang sumberdaya lokal, anggota Kube kurang siap bekerjasama dalam tim. Dengan sistem dan manajemen yang ada, ketidaksesuaian bidang usaha dengan sumberdaya lokal ternyata belum terdeteksi atau dibiarkan tanpa solusi.

Sistem monitoring yang dilakukan belum mampu mengatasi persoalan pokok di lapangan atau belum memberi solusi atas kemacetan usaha. Pendamping Kube belum cukup mampu memberi solusi. Sumberdaya pembangunan (aparatur pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan desa) belum berdayaguna memberi kontribusi pada keberhasilan program. SDM yang terlibat dalam pelaksanaan program ternyata belum mampu berimprovisasi dalam sistem yang ada sehingga dapat menyelamatkan jalannya program. Personil yang tersedia ternyata larut dalam sistem, belum mampu mencari solusi hingga program belum cukup efektif. Anggota Kube yang eksis ternyata juga kurang mampu mengorganisasikan diri, bekerjasama memanfaatkan bantuan modal usaha (stimulan) men-

jadi usaha ekonomi produktif (UEP) sehingga menjadi sumber penghasilan berkelanjutan. Akibatnya, usaha merugi dan kemudian tidak aktif (bubar).

E Rekomendasi

Penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan melalui Kube dapat dilanjutkan dengan perbaikan serius. Perbaikan yang diperlukan pada semua tahap. Pada tahap persiapan. Perbaikan yang diperlukan mulai dari sosialisasi, seleksi lokasi dan peserta. Sosialisasi sebaiknya dilakukan terbuka kepada semua aparat kelurahan yang memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi. Lokasi sebaiknya adalah kelurahan tempat warga dan aparatnya siap bekerjasama. Peserta sebaiknya diseleksi secara terbuka oleh warga setempat di bawah bimbingan pendamping. Pendamping perlu lebih ditingkatkan agar mampu membimbing Kube memilih bidang usaha yang lebih produktif. Pemerintah Kota sebaiknya diberi peran dan tanggung jawab mempersiapkan lokasi dan calon peserta dengan cara atau pendekatan yang lebih terencana (sistematis). Pengendalian sebaiknya lebih intensif, tidak sekedar mengejar pelaksanaan administratif. Pedoman Pelaksanaan perlu dilengkapi dengan petunjuk teknis untuk semua kegiatan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Kepala Puslitbang Kesos, Kementerian Sosial, Drs. Mulia Jonie, M.Si. atas perkenanya penelitian ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tim Penelitian, Haryanti Rubiyanto, Nurdin Widodo, Ayu Diah Amalia atas kerjasamanya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada: Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya; Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Manado dan jajarannya; serta Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon. dan jajarannya. Ucapan terimakasih secara khusus disampaikan kepada: Ibu Berlina; Najamudin, Brandon, Yudith, Kartini, Julfin, Jean, dan Katerine. Bapak-

ibu semua sangat berjasa hingga penelitian ini, khususnya pengumpulan data di lapangan dapat diselesaikan. Harapan kami semoga hasil penelitian ini sungguh-sungguh menjadi masukan bagi pimpinan Kementerian Sosial RI. dalam upaya memperbaiki program.

Pustaka Acuan

- Bappenas. (2014). *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas.
- Kementerian Sosial RI. (2010). *Kebijakan dan Program Pemberdayaan Fakir Miskin*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.
- Kementerian Sosial RI. (2011). *Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2011*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Kementerian Sosial RI. (2015). *Pedoman Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Tahun 2015*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Marzuki. (2011). *Sambutan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Dalam Acara Pembukaan Pembinaan Pegawai Puslitbang Kesos*. Purwakarta: Hotel Grand Wisata, 3 Oktober 2011,
- Menteri Sosial. (2016). *Peran Strategis Badiklit Pensos Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Makalah dipresentasikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Terpadu Badiklitpensos di Hotel Mercure.
- Muhtar. (2016). *Potensi Modal Sosial pada Kelompok Usaha Bersama Program Penanggulangan Kemiskinan*, *Sosio Informa* Vol. 2 No. 02 Mei – Agustus 2016. Jakarta: Puslitbang Kesos Kementerian Sosial RI.
- Mujiadi. (2013). *Studi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kube*. Jakarta: P3KS Press.
- Nainggolan, Togiartua. (2015). *Pemberdayaan Peserta Program Keluarga Harapan Melalui Kelompok Usaha Bersama di Nagari Muaro Gadang Air Haji – Pesisir*. *Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* Vol. 5 No. 03, Mei - Agustus 2016. Jakarta: Puslitbang Kesos Kementerian Sosial RI.
- Nugroho, Bambang. (2013). *Rekonstruksi Kelompok Usaha Bersama*. *Informasi Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* Vol.18 No. 01 Januari-April 2013. Jakarta: Puslitbang Kesos Kementerian Sosial RI.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden RI. Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden RI. Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Suradi & Mujiadi, B. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Lima Provinsi*. Jakarta: P3KS Press.
- Suradi. (2012). *Pendekatan Kelompok sebagai Modalitas dalam Penanggulangan Kemiskinan*. *Informasi* Vol.17 No.02 Mei-Agustus 2012. Jakarta: Puslitbang Kesos Kementerian Sosial RI.
- Sitepu, Anwar. (2015). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Kube di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah*. Jakarta. Jakarta: (tidak diterbitkan).
- Sitepu, Anwar. (2016). *Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama (Kube) Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin*. *Sosio Informa* Vol. 01 No. 01 September-Desember 2016. Jakarta: Puslitbang Kesos Kementerian Sosial RI.
- Tampubolon, J. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok: Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (Kube)*. Disertasi. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.
- <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/40679> (diakses 2 maret 2016 pkl.11.53)

